



RENCANA KERJA TAHUN 2017



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA**

Jl. Beringin Telp/fax 0411-867682 Sungguminasa Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
Jl. Beringin Telp/Fax 0411 – 867682 Sungguminasa Gowa

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2017, dapat disusun sebagai wujud usaha Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka penerapan Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

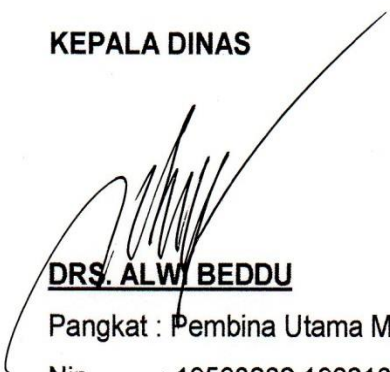
Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini menggambarkan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 tahun kedepan, sekaligus penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Publikasi ini dimaksudkan untuk informasi dan sosialisasi tentang Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa baik untuk stakeholder organisasi maupun stakeholder Pemerintah Kabupaten Gowa pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa dapat bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Sungguminasa, 20 Februari 2017

KEPALA DINAS


DRS. ALW. BEDDU

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590202 198210 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA OPD TAHUN	
LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra OPD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	
Perumahan Kawasan Permukiman dan	
Pertanahan	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	
Dan Fungsi OPD	16
2.3.1 Tugas Pokok	16
2.3.2 Fungsi	16
2.3.3 Strukrur Organisasi dan Pejabat	
Struktural.....	17
2.3.4 Permasalahan dan Hambatan	
Yang Dihadapi Dalam	
Dalam Penyelenggaraan Tugas	
Dan Fungsi Dinas	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20

2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	32
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan...	34
BAB IV	PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP Daerah dengan berpedoman pada Renstra OPD. Rencana Kerja tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi rakyat.

Sebagai tindak lanjut telah disusunnya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-OPD) Kabupaten Gowa serta menindaklanjuti tersedianya rancangan RPJP, RPJM dan RKP Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2017. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2017 disusun sebagai bagian dari upaya membangun sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah yang handal dengan pertimbangan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan bertahap serta berkesinambungan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, permasalahan dan tantangan, potensi serta aspirasi masyarakat yang selalu dinamis.

Rangkaian kegiatan pembangunan di tingkat satuan kerja perangkat daerah dilakukan secara sistematis dan terpadu berdasarkan aturan dan ketentuan/pedoman yang ada dan disepakati sebagai penyempurnaan atas rangkaian yang telah ditempuh selama ini, dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2017 yang merupakan penyelarasan dari pembangunan jangka panjang atau makro hingga jangka menengah dan jangka pendek atau mikro.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2017 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E Tahun 2004);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri E Tahun 2004);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Gowa mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan hasil musrenbang Kabupaten untuk melaksanakan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.
2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- f. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Maupun IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lainnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Identifikasi

Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah OPD yang baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sehingga evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gowa**

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)		Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		%	-	250 Unit	350 Unit	-	100%	100%	100%	
2	Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun		km	-	3.98	4.18	-	100%	100%	100%	
3	Luas Pemukiman Kumuh		Ha	-	50	50	-	100%	100%	100%	
4	Jumlah Lahan Pemda Bersertifikat		bidang		100	100	-	100%	100%	100%	

Sungguminasa, 20 Februari 2017


 KEPALA DINAS
 DRS. ALWI BADDU
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590202 198210 1 003

Kawasan Kumuh

Kawasan permukiman kumuh yaitu perbandingan luas lahan permukiman atau rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menempati. Indikator yang terjadi kawasan permukiman padat penduduk, rumah berhimpitan sehingga memudahkan penularan kebakaran, pelayanan sarana dan prasarana tidak lagi mencukupi, seperti kurangnya air bersih, sanitasi buruk, sampah berserakan, jaringan listrik yang ruwet, fasilitas umum dipakai untuk kepentingan pribadi sehingga lingkungan menjadi tidak tertib dan kotor. Identifikasi fisik lingkungan kawasan kumuh dapat dilihat pada table dibawah ini :

Identifikasi fisik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa

Obyek	Indikator	Akibat
1. Rumah	1. Padat 2. Berhimpitan 3. Jarak antar rumah tidak ada	1. Pencahayaan alami / Matahari kurang 2. Sirkulasi udara tidak lancar 3. Rawan kebakaran 4. Lingkungan tidak sehat 5. Penyakit mudah menular 6. Bekerja kurang optimal 7. Penyakit sosial mudah berkembang
2. Air Bersih	1. Masyarakat kurang terlayani 2. Masih ada yang	1. Lingkungan tidak sehat 2. Penyakit mudah menular
3. Sanitasi Lingkungan	1. Lingkungan kotor 2. Bau 3. lalat 4. Lembab 5. Kotoran	1. Lingkungan tidak sehat 2. Penyakit mudah menular 3. Lalat berterbangan 4. Tercium bau tidak sedap 5. Tingkat kesehatan penduduk rendah
4. Pengelolaan Sampah	1. Tempat sampah kurang 2. Sampah menumpuk ditempat tertentu	1. Lalat berterbangan 2. tercium bau tidak sedap 3. Penyakit mudah menular

5.Sirkulasi/jalan setapak	1. Lebar dibawah 1 m 2. Konstuksi tanah 3.Jalan juga untuk Pemanfaatan lain	4.Tingkat kesehatan Penduduk rendah 1. Sirkulasi tidak mudah/nyaman 2. Lingkungan kotor 3. Tingkat kesehatan Penduduk rendah
---------------------------	---	---

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa merupakan perangkat daerah sebagai unsure pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan tugas pembantuan.

2.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Subag, 8 (delapan) Seksi. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Drs. Alwi Beddu

- b. Sekretaris

Ir. Asmahati Arfah MSP

- b.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian

Herlina Madjid, S.Sos

- b.2 Kasubag Keuangan dan Perencanaan

M. Yusuf, ST

- c. Kepala Bidang Perumahan

Ariyanto Abbas, SE

- c.1 Kepala Seksi Pengembangan Perumahan

Awaluddin, S.Sos

- c.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan

Amir, ST

c.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Muh. Irfand Madjid, ST, MM

d. Kepala Bidang Permukiman

Ir. Asmahati Arfah MSP

d.1 Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman

Rusdin Nungsi

d.2 Kepala Seksi Pemeliharaan Permukiman

Ruslan Efendi, S.Sos

d.3 Kepala Seksi Pembinaan dan Peraturan perumahan dan Kawasan Permukiman

Misbahuddin, SH

e. Kepala Bidang Pertanahan

Syahrul Syahril, ST

e.1 Kepala Seksi Pengadaan dan penggunaan tanah

Tauhid, S.Hut, M.Si

e.2 Kepala Seksi Pengamanan Tanah Negara

Hj. Erna HL, SE

Adapun gambar Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut :

2.3.4 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, antara lain:

1. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian perumahan khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu.
2. Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baik karena adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan ketentuan teknis.
3. Masih banyaknya kualitas permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi criteria layak huni.
4. Masih banyaknya tanah asset pemerintah Kabupaten Gowa yang belum disertifikasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang telah disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disajikan dalam table 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Gowa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan umum Administrasi Perkantoran	Gowa			248,181,300	Program Pelayanan Umum Administrasi	Gowa			248,181,300	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Gowa	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	73,000,000	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Gowa	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	73,000,000	
	2 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Gowa	Jumlah bahan bacaan	Exp	13,300,000	2 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Gowa	Jumlah bahan bacaan	Exp	13,300,000	
	3 Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah	Gowa	lancarnya rapat dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	71,830,500	3 Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah	Gowa	lancarnya rapat dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	71,830,500	
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Gowa	Tersedianya jasa administrasi ketatausahaan kantor	12 bulan	90,050,800	4 Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Gowa	Tersedianya jasa administrasi ketatausahaan kantor	12 bulan	90,050,800	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Gowa			102,795,500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Gowa			102,795,500	
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Gowa	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	98,700,500	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Gowa	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	98,700,500	

	2	pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Gowa	Terpeliharanya perengkapan gedung kantor	12 bulan	4,095,000			
3	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Gowa			41,867,805			41,867,805
	1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gowa	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	41,867,805			41,867,805
4	4	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Gowa			500,934,000			
	1	Penyusunan Ranperda Perumahan dan kawasan Permukiman	Gowa	Jumlah Ranperda Perumahan dan Permukiman	1 Dok	157,600,000			
	2	Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Gowa	Prosentase Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	80%	105,500,000			
	3	Verifikasi PSU Perumahan	Gowa	Laporan Verifikasi PSU Perumahan	1 Laporan	99,300,500			
	4	Identifikasi/Pendataan kawasan Permukiman Kumuh	Gowa	Laporan Identifikasi kawasan permukiman kumuh	1 Laporan	91,813,500			

	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kawasan Permukiman	Gowa	Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan kawasan permukiman	1 Laporan	46,720,000	46,720,000	
5	Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS	Gowa				4,520,000,000	4,520,000,000	
	1 Kegiatan Peningkatan Rumah Layak Huni / BSPS (DAK)	Gowa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang direnovasi	Unit		4,520,000,000		
6	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Gowa				905,500,000	905,500,000	
	1 Biaya Operasional Program Kota Tanpa Kumuh	Gowa	Luas Pemukiman Kumuh	ha		905,500,000		
7	Program Penatausahaan Pengusahaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Gowa				309,476,500	798,300,325	
	1 Kegiatan Pensertifikatan Tanah	Gowa	Jumlah bidang lahan Pemda bersertifikat			561,100,325	561,100,325	

2	Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk kepentingan pemda	Gowa	Jumlah Tanah yang dibebaskan	1,000,000	2	Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk kepentingan pemda	Gowa	Jumlah Tanah yang dibebaskan	1,000,000		
					3	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Gowa	Terlaksananya Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara	175,000,000		
					4	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Gowa	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Tanah Negara	61,200,000		

Sungguminasa, 20 Februari 2017

KEPALA DINAS

DRS. ALWI BUDU

Pangkat : Pembina Utama muda

Nip : 19590202 198210 1 003

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat.

Proses penjangkauan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Berikut disajikan Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 seperti pada table 2.3.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Kualitas Rumah/BSPS				
	1 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Borongpa'la'la Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	30 Unit	
	2 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Bontolempangan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	35 Unit	
	3 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Kel.Benteng Somba Opu	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit	
	4 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Kel. Tombolo Kec. Somba Opu	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	175 Unit	
	5 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Pallantikang kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	5 Unit	
	6 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Bilangrengi Kec. Parigi	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	10 Unit	
	7 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Bontomanai Kec. Bungaya	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit	
	8 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Pabbundukang Kec. Bontonompo Selatan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	110 Unit	
	9 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Salajo Kec.Bontonompo Selatan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	10 Unit	
	10 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Tindang Kec. Bontonompo selatan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	60 Unit	
	11 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa bontoloe Kec.Bontolempangan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	25 Unit	
	12 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Lassa-lassa Kec.Bontolempangan	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	50 Unit	
	13 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Lembangloe Kec. Biringbulu	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	100 Unit	

14	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Tangalla Desa Kanjilo Kec. Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	30 Unit
15	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Kanjilo Desa Kanjilo Kec. Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit
16	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Camba Desa Kanjilo kec. Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit
17	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Bontomanai Desa KanjiloKec.Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit
18	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Cilallang Desa Kanjilo Kec.Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	20 Unit
19	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Dusun Bilaji Desa Kanjilo Kec.Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	30 Unit
20	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Moncobalang Kec. Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	10 Unit
21	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Tamannyeleng Kec.Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	150 Unit
22	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa bontomanai Kec. Bajeng Barat	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	100 Unit
23	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Je'ne Madinging Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
24	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Paccelleang Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
25	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa PanaiKang Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
26	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Pattallassang Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
27	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
28	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa Timbuseng Kec.Pattallassang	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	7 Unit
29	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Desa majannang Kec.Parigi	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	15 Unit

30	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Majannang Lingkungan Borongbilalang Kec.Bajeng	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	30 Unit	
31	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni/BSPS (DAK)	Kel. Lembang Parang Kec. Barombong	Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	40 Unit	
2	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman				
1	1 verifikasi PSU Perumahan	Rw I Lingg. Galogoro Kec.Somba Opu	Terlaksananya Verifikasi PSU Perumahan	100 Pohon	
2	2 Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Kel.Sungguminasa kec.Somba Opu	terciptanya keteraturan nomor rumah penduduk	5000 KK	
3	Program Penatausahaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				
1	1 Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemda	Desa Sicini Kec.Parigi	Terlaksananya pembebasan tanah untuk kepentingan Pemda	1 Ha	
2	2 Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemda	Desa majannang Kec.Parigi	Terlaksananya pembebasan tanah untuk kepentingan Pemda	1 Ha	

Sungguminasa, 20 Februari 2017
 KEPALA DINAS
 DRS. ALWI BIEDDU
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590202 198210 1 003

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

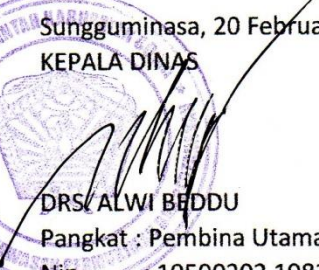
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan Provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan diwilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam table 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Gowa Tahun**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan berkelanjutan dikawasan strategis, tertinggal, perbatasan daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.	Renstra PUPR	
2	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang wilayah dan pembangua berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem dikawasan pusat produksi dan ketahanan pangan		
3	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance		
B	Provinsi		
1	Penguatan sistem informasi penataan ruang dan pembangunan permukiman dan perumahan		
2	Menyiapkan perangkat dan pemantapan pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang kawasan		

Sungguminasa, 20 Februari 2017
KEPALA DINAS

DRS ALWI BEDDU
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590202 198210 1 003

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan.

Adapun tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5(lima) tahun kedepan adalah :

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan dukungan manajemen,administrasi dan SDM Aparatur sesuai prinsip Good Governance	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur
2	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman
3	Meningkatkan tertib pelaksanaan Pengendalian serta pengawasan bangunan dan permukiman	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan di kawasan perumahan dan non perumahan
4	Menciptakan tertib administrasi tatakelola bidang pertanahan dan pengembangan wilayah	Terciptanya tatakelola dan tertib administrasi bidang pertanahan dan tatakelola dan pengembangan wilayah yang baik

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Program

1. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
5. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
6. Program Peningkatan kualitas Rumah / BSPS
7. Program Kota Tanpa Kumuh
8. Program Penatausahaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

B. Kegiatan

Secara umum kegiatan prioritas dan rencana anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dapat ditampilkan seperti pada table 3.2

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2017**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2017 (Tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Gowa	100%	248,181,300	APBD		100%	248,181,300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Gowa	12 Bulan	73,000,000	APBD		12 Bulan	73,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Gowa	3 Exp	13,300,000	APBD		3 Exp	13,300,000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	lancarnya rapat dan koordinasi keluar daerah	Gowa	12 Bulan	71,830,500	APBD		12 Bulan	71,830,500	
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Tersedianya jasa administrasi ketatausahaan kantor	Gowa	12 Bulan	90,050,800	APBD		12 Bulan	90,050,800	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Gowa	100%	102,795,500	APBD		100%	102,795,500	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Gowa	12 bulan	98,700,500	APBD		12 bulan	98,700,500	
	pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Gowa	12 bulan	4,095,000	APBD		12 bulan	4,095,000	

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Gowa	100%	41,867,805	APBD		100%	41,867,805
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Gowa	1 Laporan	39,950,000	APBD		1 Laporan	39,950,000
	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman		Gowa		500,934,000	APBD			500,934,000
	Peyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Ranperda Perumahan dan Permukiman	Gowa	1 Dok	157,600,000	APBD		1 Dok	157,600,000
	Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Prosentase Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Gowa	80%	105,500,000	APBD		80%	105,500,000
	Verifikasi PSU Perumahan	Laporan Verifikasi PSU Perumahan	Gowa	1 Laporan	99,300,500	APBD		1 Laporan	99,300,500
	Identifikasi/Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh	Laporan Identifikasi kawasan permukiman kumuh	Gowa	1 Laporan	91,813,500	APBD		1 Laporan	91,813,500
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan kawasan permukiman	Gowa	1 Laporan	46,720,000	APBD		1 Laporan	46,720,000
	Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPPS		Gowa	350 Unit	4,520,000,000	APBN		350 Unit	4,520,000,000
	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Rumah Layak Huni / BSPPS (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yg direnovasi	Gowa	350 Unit	4,520,000,000	APBN		350 Unit	4,520,000,000
	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		Gowa		905,500,000	APBD		50 ha	905,500,000

	Biaya Operasional Program Kota Tanpa Kumuh	Luas Pemukiman Kumuh	Gowa	50 ha	905,500,000	APBD		50 ha	905,500,000
	Program Penatausahaan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Gowa		561,100,325	APBD			561,100,325
	Kegiatan Pensertifikatan Tanah	Jumlah bidang lahan Pemda bersertifikat	Gowa	100 Bidang	323,900,325	APBD		100 Bidang	323,900,325
	Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk kepentingan pemda	Jumlah Tanah yang dilebaskan	Gowa	1 Bidang	1,000,000	APBD		1 Bidang	1,000,000
	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksananya Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara	Gowa	70%	175,000,000	APBD		70%	175,000,000
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Tanah Negara	Gowa	70%	61,200,000	APBD		70%	61,200,000

Sungguminasa, 20 Februari 2017

KEPALA DINAS



DRS. ALWI BÉDDU

Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590202 198210 1 003

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan kewenangan urusan Perumahan permukiman dan Pertanahan yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.

Semoga Renja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

